



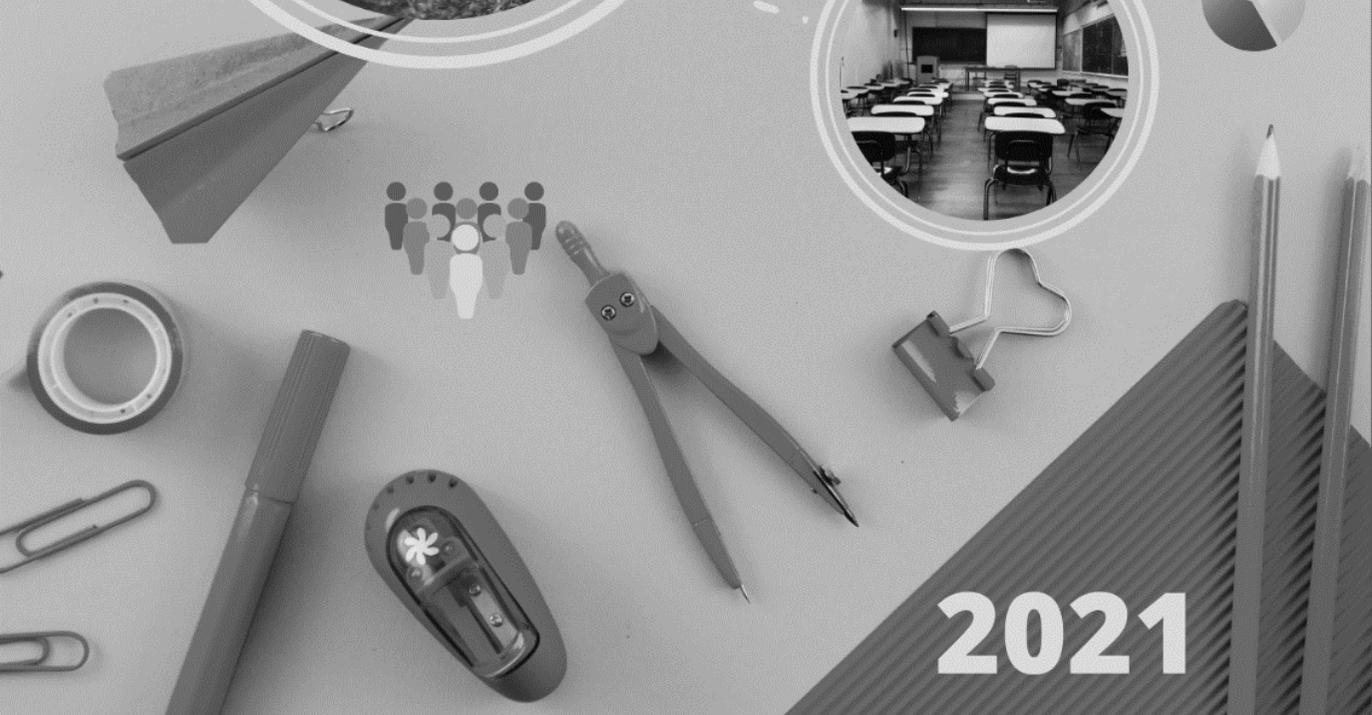
STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



2021



STATISTIK PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



2021

Statistik Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti 2021

ISBN. : -
No. Publikasi : 14100.2217
Katalog : 4301002.1410

Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 62 Halaman

Naskah:
BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Penyunting:
BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Gambar Kulit:
BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Diterbitkan oleh:
© BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Dicetak oleh:
CV. MN.Grafika

Sumber Ilustrasi
freepik.com
canva.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau mengandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



TIM PENYUSUN

Penanggungjawab:

Sumi'rad, SST

Penyunting:

Sumi'rad, SST

Pemeriksa Tabel dan Grafik:

Is Sugiyanti, SST, M.Si

Andri Suhery, SST, M.Si

Penulis:

Is Sugiyanti, SST, M.Si

Andri Suhery, SST, M.Si

Rizka Heryanti, S.Tr.Stat.

Chetryn R. Aritonang, S.Tr.Stat.

Pengolah data:

BPS RI

Pembuat Cover dan Infografis:

Rizka Heryanti, S.Tr.Stat.

Chetryn R. Aritonang, S.Tr.Stat.



KATA PENGANTAR

Pendidikan adalah proses terencana sebagai investasi masa depan, sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya dan mengambil peran dalam kehidupan. Pendidikan yang bermutu menjadi modal sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Statistik Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti 2021 memberikan gambaran kondisi pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan hasil Susenas Maret 2021. Data yang disajikan mencakup beberapa indikator utama proses dan capaian pendidikan. Selain itu juga disajikan data hasil registrasi sekolah yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Data ini memuat informasi mengenai jumlah sekolah, peserta didik, guru, dan sarana prasarana pendidikan.

Kehadiran publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan dalam memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan strategi pembangunan di bidang pendidikan. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama yang berkepentingan dalam pengembangan dan pembangunan di bidang pendidikan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan publikasi di masa yang akan datang.

Selatpanjang, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Kepulauan Meranti


Sumi'rad, SST



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	3
Pendidikan di Masa Pandemi.....	3
Pembanguann Pendidikan, Kini dan Nanti	4
Indikator Pendidikan sebagai Monitoring Pembangunan	4
Sistematika Penulisan	5
BAB II. METODOLOGI	9
Sumber Data	11
Konsep dan Definisi	11
BAB III. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN	15
Jumlah Sekolah	17
Peserta DidiK	20
Tenaga Pendidik.....	22
BAB IV. PARTISIPASI SEKOLAH	27
Partisipasi Sekolah	29
Angka Partisipasi Kasar	32
Angka Partisipasi Murni	34
BAB V. HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN	37
Angka Melek Huruf (AMH)	39
Tingkat Pendidikan.....	42
Rata-Rata Lama Sekolah	44
HASIL PENGHITUNGAN <i>SAMPLING ERROR</i>	47
CATATAN TEKNIS	57
DAFTAR PUSTAKA	61



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021	18
Tabel 3.2 Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021	21
Tabel 3.3 Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021	24
Tabel 3.4 Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021	25
Tabel 4.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021	30
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021	31
Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021	32
Tabel 4.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021	33
Tabel 4.5 Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021	34
Tabel 5.1 Angka Melek Huruf di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kelompok Umur, 2021	41
Tabel 5.2 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021	19
Gambar 3.2 Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Madrasah dan Status Sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2020/2021	19
Gambar 3.3 Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan Sekolah, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021	20
Gambar 3.4 Persentase Perubahan Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2019/2020, dan 2020/2021	21
Gambar 3.5 Persentase Perubahan Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan Sekolah, Tahun Ajaran 2020/2021	22
Gambar 3.6 Persentase Perubahan Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan Sekolah dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2020/2021	23
Gambar 3.7 Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2019/2020, dan 2020/2021	24
Gambar 4.1 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Provinsi Riau yang Menggunakan Telepon Seluler dan Komputer, 2019-2021	36
Gambar 4.2 Persentase Peserta Didik Umur 5-24 Tahun di Provinsi Riau yang Mengakses Internet Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Jenjang Pendidikan, 2022	36
Gambar 4.3 Persentase Peserta Didik Umur 10-24 Tahun di Provinsi Riau yang Bekerja dan Mengurus Rumah Tangga, 2019-2021	38
Gambar 5.1 Angka Melek Huruf di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kelompok Umur, 2019-2021	40
Gambar 5.2 Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Jenis Kelamin, 2021	41
Gambar 5.3 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2021	42
Gambar 5.4 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2021	43
Gambar 5.5 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2019-2021	43
Gambar 5.6 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2019-2021	44



<https://merantikab.bps.go.id>



Pendahuluan



7

Agenda Pembangunan
RPJMN 2020-2024



Meningkatkan Sumber Daya
Manusia Berkualitas dan
Berdaya Saing



Fokus utama pembangunan pendidikan pada
RPJMN 2020-2024 masih kepada
peningkatan kualitas dan pemerataan
layanan pendidikan



Dibutuhkan Informasi indikator yang
berkaitan dengan capaian
pembangunan di bidang pendidikan dan
disajikan dalam bentuk buku publikasi



Statistik Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Meranti
2021

BAB I PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan tersebut dipertegas pada Pasal 31 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2 kemudian menekankan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya pendidikan di negara Indonesia.

Pendidikan, dalam pengertiannya yang paling luas, memainkan peran yang makin besar untuk mewujudkan perubahan mendasar dalam cara manusia hidup dan bertindak. Pendidikan pun menjadi investasi masa depan, karena dengan pendidikan manusia mampu menyesuaikan cara berpikirnya mengembangkan segala potensi diri, dan mengambil peran dalam kehidupan. Pendidikan menjadi modal dalam mengantarkan negara dan masyarakat berinteraksi pada skala global menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. Meskipun bukan jalan yang singkat untuk dapat dilalui namun merupakan salah satu bekal yang bisa diandalkan dan secara tidak langsung menjadi modal pembangunan bagi negara.

Pendidikan di Masa Pandemi

Sudah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda negeri ini. Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang terkena dampak cukup fatal terhadap implementasi pembelajaran. Untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, Pemerintah Indonesia telah menginstruksikan sekolah maupun perguruan tinggi untuk melakukan beberapa tindakan pencegahan di masing-masing satuan pendidikan sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada satuan pendidikan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menetapkan



beberapa kebijakan terkait proses belajar mengajar peserta didik, penilaian dan penentuan kelulusan, serta penerimaan peserta didik baru agar dapat terlaksana tanpa adanya risiko yang dapat membahayakan kesehatan peserta didik maupun pendidik.

Sejak pertama kali kasus COVID-19 ditemukan di Indonesia pada Maret 2020, peserta didik diminta untuk mengikuti proses belajar mengajar melalui pembelajaran jarak jauh (Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020). Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) dinilai kurang efektif dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka secara langsung. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem, tidak hanya di Indonesia, menurunnya efektifitas PJJ juga terjadi di seluruh dunia (Kompas, 2021). Lebih lanjut dijelaskan bahwa hal tersebut salah satunya disebabkan karena minimnya konektivitas internet serta tidak adanya perangkat gawai untuk belajar secara *online*. Untuk mengantisipasi kondisi pandemi, pemerintah telah mengambil kebijakan terkait ketentuan penilaian serta kelulusan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19.

Pembangunan Pendidikan, Kini dan Nanti

Pendidikan tidak hanya menjadi salah satu isu di Indonesia tetapi juga menjadi salah satu isu yang disorot dunia. Oleh karena itu bidang ini menjadi satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*), tepatnya pada tujuan ke-4 yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Bidang pendidikan juga menjadi salah satu arah utama pembangunan yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. RPJMN 2020-2024 tersebut



merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pendidikan menjadi bagian dari arah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Arah pembangunan SDM tersebut merupakan satu dari 7 agenda pembangunan yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Fokus utama pembangunan pendidikan pada RPJMN 2020-2024 masih kepada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan.

Tingkat pendidikan masyarakat telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kesenjangan pendidikan antarkelompok ekonomi masih menjadi permasalahan dan semakin lebar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Kesenjangan pendidikan juga masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sayangnya, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*).

Salah satu tantangan dalam pembangunan pendidikan sebagaimana yang diulas dalam narasi RPJMN 2020-2024 adalah adanya revolusi industri 4.0. Semakin berkembangnya teknologi digital dapat dimanfaatkan dalam membantu proses pembangunan di bidang pendidikan yaitu melalui pembelajaran jarak jauh (*distance learning*).

Indikator Pendidikan sebagai Monitoring Pembangunan

Pendidikan dan pembangunan berada dalam suatu proses yang saling mengisi. Proses pendidikan menempatkan manusia sebagai pusat, karena pendidikan mempunyai tugas menghasilkan SDM yang berkualitas untuk pembangunan bangsa.



Parameter dari keberhasilan suatu sistem pendidikan adalah dengan melihat hasil capaian pendidikan. Hal ini juga menjadi satu cara untuk memprediksi masa depan bangsa.

Guna menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan, dibutuhkan informasi yang secara lengkap dapat menjelaskan kondisi dan situasi pembangunan pendidikan di Indonesia. Informasi tersebut digambarkan melalui berbagai macam indikator yang berkaitan dengan capaian pembangunan di bidang pendidikan dan disajikan dalam bentuk buku publikasi “Statistik Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti 2021”. Publikasi ini memberikan gambaran mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021.

Secara umum, publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai dunia pendidikan yang diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan maupun program pembangunan di bidang pendidikan berdasarkan data yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021 serta data sekunder dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ajaran 2020/2021. Data-data yang disajikan didisagregasi menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin sehingga diharapkan mampu menggambarkan pemerataan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sistematika Penulisan

Secara sistematis Publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 disajikan dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan, yang menceritakan bagaimana gambaran pendidikan di masa pandemi, pembangunan pendidikan saat ini dan nanti, pentingnya data pendidikan sebagai monitoring pembangunan, serta sistematika penulisan dari publikasi.



Bab II

Metodologi, memaparkan sumber data serta konsep dan definisi.

Bab III

Sarana dan Prasarana Pendidikan, memaparkan jumlah sekolah, peserta didik, guru, serta rasio guru dan murid.

Bab IV

Partisipasi Sekolah, yaitu menampilkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Bab V

Hasil dan Capaian Proses Pendidikan, menjelaskan Angka Melek Huruf, Kemampuan Membaca dan Menulis, dan Tingkat Pendidikan.

Selain itu, pada akhir bab juga akan disajikan hasil penghitungan *sampling error* guna melihat tingkat kesalahan yang ditimbulkan oleh teknik pengambilan sampel. Sementara penjelasan mengenai konsep definisi disajikan dalam catatan teknis.





Metodologi



1

SUSENAS
(Survei Sosial Ekonomi
Nasional)
periode Maret

2

Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Sumber
Data

Total sampel Susenas
Maret di Kab. Kepulauan
Meranti adalah 570 rumah
tangga

Pengumpulan data
menggunakan kuesioner
VSEN22.K dan
VSEN22.KP

Susenas
Maret?

2019-
2021

Kab.
Kepulauan
Meranti

Periode dan
Wilayah

BAB II METODOLOGI

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan publikasi Statistik Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 ini adalah hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2019 sampai dengan 2021. Susenas memiliki cakupan data sosial paling luas bila dibandingkan dengan survei-survei yang lain. Di dalam Susenas mencakup banyak data yang di antaranya adalah data pendidikan. Selain itu, untuk melengkapi kebutuhan data pendidikan lainnya, beberapa data diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi diperlukan untuk menghindari cara pandang, persepsi maupun anggapan yang berbeda. Adapun konsep definisi yang digunakan dalam indikator pendidikan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bersekolah, adalah mendapat pendidikan atau pengajaran di sekolah. Dikatakan bersekolah apabila seseorang terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar, baik di suatu jenjang formal maupun non formal (program kesetaraan Paket A/B/C) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun kementerian lainnya.
- b. Umur, adalah lama waktu hidup sejak dilahirkan.
- c. Tidak/Belum pernah bersekolah, adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal, termasuk juga yang tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar.
- d. Masih bersekolah, adalah anggota rumah tangga berumur 5 tahun ke atas yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan, baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal, yang berada di bawah pengawasan



Kemendikbud maupun kementerian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh institusi pemerintah maupun institusi swasta. Termasuk bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah.

- e. Tidak bersekolah lagi, adalah anggota rumah tangga yang berumur 5 tahun ke atas yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (di bawah pengawasan Kemendikbud maupun kementerian lainnya), yang pada saat pendataan/survei sudah tidak terdaftar atau tidak aktif mengikuti pendidikan lagi.
- f. Pendidikan Formal, adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SM/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi (PT).
- g. Pendidikan Non Formal, adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang (Paket A/B/C).
- h. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal dan non formal.
- i. Angka Melek Huruf (AMH), adalah proporsi penduduk usia tertentu yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya, terhadap kelompok penduduk usia tertentu. Angka ini digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai di suatu daerah, karena melek huruf (membaca dan menulis) merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan.



Rumus yang digunakan adalah:

$$AMH = \frac{\text{Banyaknya penduduk usia tertentu yang dapat membaca dan menulis}}{\text{Banyaknya penduduk usia tertentu}} \times 100$$

- j. Angka Partisipasi Kasar (APK), adalah proporsi dari semua anak yang sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia jenjang tertentu. APK ini digunakan untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan.

Rumus yang digunakan adalah:

$$APK = \frac{\text{Banyaknya penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu}} \times 100$$

- j. Angka Partisipasi Sekolah (APS), adalah proporsi dari semua anak pada suatu kelompok umur tertentu yang masih sekolah terhadap penduduk pada kelompok umur yang sesuai. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS ini bermanfaat untuk menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan menurut kelompok umur tertentu.

Rumus yang digunakan adalah:

$$APS = \frac{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu yang sedang sekolah}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu}} \times 100$$

- i. Angka Partisipasi Murni (APM), adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya, terhadap seluruh anak pada kelompok usia tersebut. Sejak tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B dan Paket C) turut diperhitungkan. APM ini digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat pada waktunya.



Rumus yang digunakan adalah:

$$APM = \frac{\text{Banyaknya pddk usia sekolah tertentu yg sekolah pada jenjang yg sesuai}}{\text{Banyaknya penduduk usia sekolah tertentu}} \times 100$$

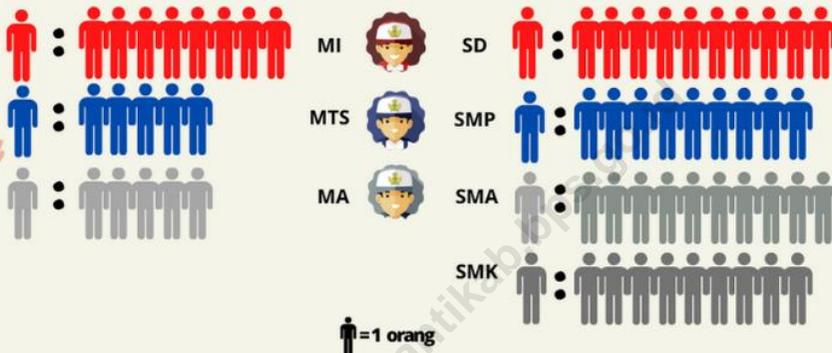
- m. Rata-rata Lama Sekolah, adalah rata-rata jumlah tahun yang telah diselesaikan oleh penduduk pada seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Proses penghitungannya menggunakan tiga variabel simultan, yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, jenjang pendidikan yang ditamatkan, dan ijazah tertinggi yang dimiliki. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang yang ditamatkan.
- n. Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.
- o. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.
 - SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.
 - SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.
 - SM/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) dan sederajat.
 - PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I/II/III, DIV/S1, S2, S3 dan sederajat





Sarana dan Prasarana Pendidikan

RASIO MURID PER GURU MENURUT JENJANG PENDIDIKAN DI KAB. KEPULAUAN MERANTI, 2021



Rasio murid per guru menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah memenuhi kondisi ideal

"Jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Sedangkan, pada jenjang SMK idealnya satu guru bertanggung jawab pada 15 murid"

- Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

"Ketersediaan guru baik secara kualitas dan kuantitas memegang peranan penting. Ketersediaan guru yang cukup akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar"

PERTUMBUHAN JUMLAH GURU MENURUT JENJANG PENDIDIKAN



BAB III

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Sarana dan prasarana pendidikan menjadi bagian dari standar pendidikan nasional. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003, bahwa setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana dan prasarana pendidikan harus tersedia semaksimal mungkin guna mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar, agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman dan tanpa ada kendala. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Jumlah Sekolah

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 memberikan pengaruh ke semua bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan. Kebijakan phisycal distancing yang diterapkan pemerintah, yaitu himnauan kepada masyarakat untuk menjaga jarak terhadap orang lain dengan membatasi aktivitas di luar ruangan yang melibatkan banyak orang, membuat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berubah drastis. Kegiatan belajar mengajar yang semula dilakukan seluruhnya di sekolah secara tatap muka menjadi secara daring yang dilakukan dari rumah masing-masing, baik guru maupun murid. Sistem belajar mengajar secara daring menjadi tantangan tersendiri, baik untuk tenaga pendidik, murid, bahkan orang tua murid. Tenaga pendidik, murid dan juga orang tua murid harus beradaptasi dengan kondisi ini dan dituntut untuk dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien juga aktif agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.

Pendidikan di Indonesia dilaksanakan oleh dua Lembaga, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Kemendikbud membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan, termasuk segala jenjang pendidikan dan kebudayaan yang ada di Indonesia, contohnya Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan sederajat, menjadi tanggung jawabnya. Kemenag mengurus segala persoalan yang berhubungan dengan agama, termasuk pendidikan agama. Kewenangan Kemendikbud dan Kemenag dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan masing-masing. Kebijakan Kemendikbud hanya untuk sekolah,



sedangkan kebijakan Kemenag hanya untuk madrasah. Namun, sekolah dan madrasah memiliki visi yang sama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada tahun ajaran 2020/2021, jumlah sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami penurunan. Penurunan jumlah Sekolah Dasar yang cukup besar disebabkan karena ada beberapa sekolah yang mengalami penggabungan. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir jumlah siswa yang tidak sesuai dengan ruang belajar. Jumlah sekolah pada jenjang pendidikan lainnya, yaitu Sekolah Menengah Pertama mengalami kenaikan, dan Sekolah Menengah Atas tidak mengalami perubahan.

Tabel 3.1.

Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021

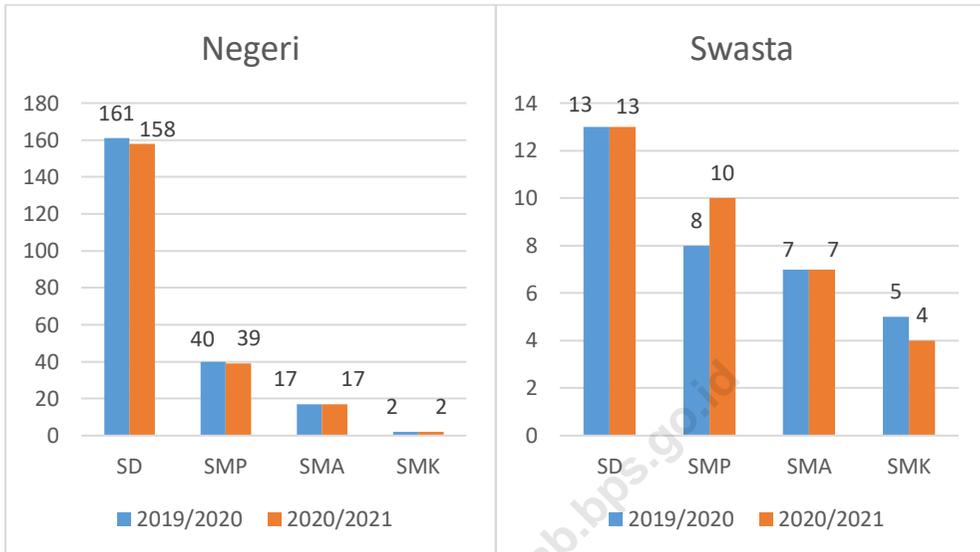
Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran		
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar	174	174	171
Sekolah Menengah Pertama	46	48	49
Sekolah Menengah Atas	23	24	24
Sekolah Menengah Kejuruan	7	7	6

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003, sekolah sebagai sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan non pemerintah. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah disebut sebagai sekolah negeri, sedangkan sekolah yang diselenggarakan oleh non pemerintah disebut sekolah swasta. Sekolah negeri dan swasta memiliki karakteristik yang berbeda. Sekolah negeri diselenggarakan untuk memberikan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan murni, sedangkan sekolah swasta diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus yang tidak bisa diberikan sekolah negeri, misalnya pendidikan keagamaan yang mendalam. Jumlah sekolah swasta di Kepulauan Meranti pada tahun ajaran 2020/2021 meningkat pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dan menurun di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk dua jenjang pendidikan lainnya, yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas tidak mengalami perubahan.



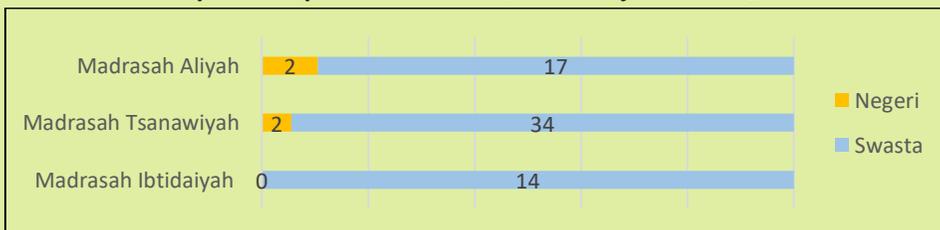
Gambar 3.1.
Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tahun ajaran 2020/2021, jumlah madrasah di Kabupaten Kepulauan Meranti cenderung tetap. Penurunan jumlah sebanyak satu madrasah terjadi pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah. Jumlah madrasah di Indonesia mayoritas dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau swasta. Fenomena ini juga terjadi di Kepulauan Meranti, dimana untuk Madrasah Ibtidaiyah, seluruhnya merupakan madrasah swasta. Untuk Madrasah Tsanawiyah di Kepulauan Meranti, hanya 5,56 persen yang merupakan madrasah milik pemerintah. Persentase Madrasah Aliyah milik pemerintah merupakan tertinggi di antara jenjang pendidikan, sebesar 10,53 persen.

Gambar 3.2.
Jumlah Sekolah menurut Jenjang Pendidikan Madrasah dan Status Sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2020/2021



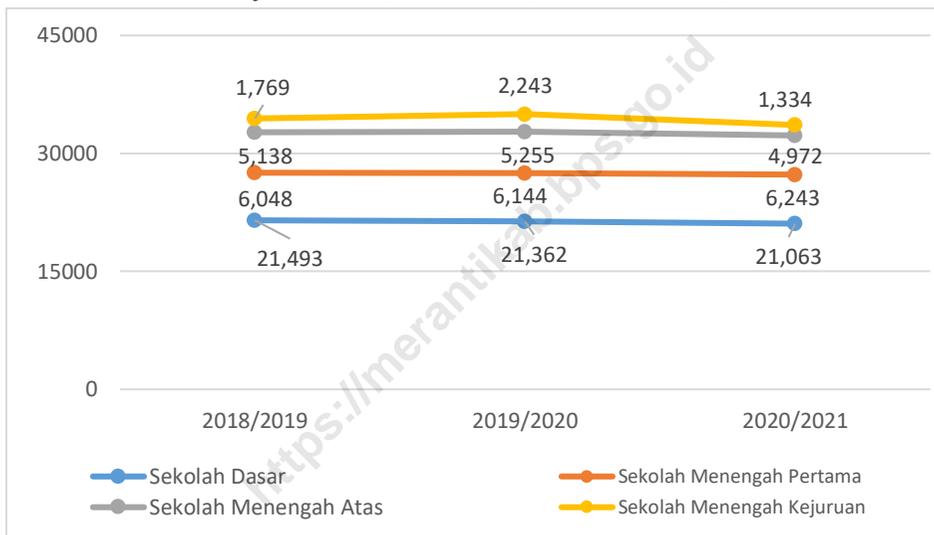
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Peserta Didik

Secara umum, jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2020/2021 pada setiap jenjang pendidikan di Kepulauan Meranti mengalami penurunan, kecuali pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Kondisi ini sesuai dengan perubahan jumlah sekolah yang ada, dimana penambahan jumlah Sekolah Menengah Pertama dapat mengakomodasi jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan tersebut.

Gambar 3.3.
Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan Sekolah, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021

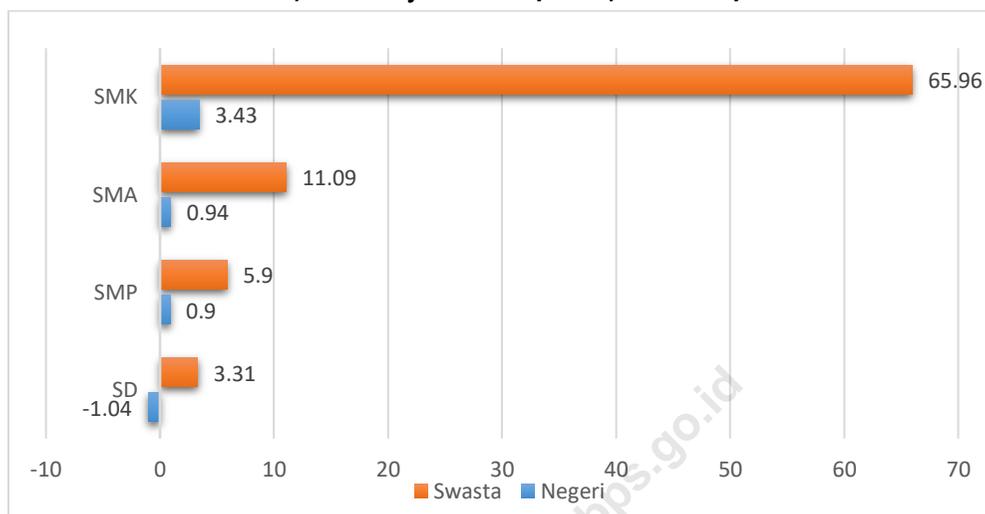


Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Secara umum pertumbuhan peserta didik menunjukkan peningkatan, hanya jumlah peserta didik di Sekolah Dasar Negeri yang mengalami penurunan di tahun ajaran 2019/2020. Penurunan ini sejalan dengan kebijakan penggabungan beberapa sekolah dasar negeri pada tahun ajaran selanjutnya. Pertumbuhan jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2019/2020 pada sekolah swasta lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri pada setiap jenjang pendidikan. Tingginya minat orang tua siswa dan siswa sendiri untuk masuk ke sekolah swasta daripada negeri dapat disebabkan karena kemudahan sekolah swasta untuk menerima siswa dari manapun. Sekolah swasta tidak terpengaruh oleh sistem zonasi yang diberlakukan di sekolah negeri. Proses pendaftaran di sekolah swasta juga lebih simple, walaupun terkadang untuk masuk ke sekolah swasta orangtua siswa mesti mengeluarkan dana yang lebih besar dibandingkan jika mendaftar di sekolah negeri.



Gambar 3.4.
Persentase Perubahan Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2019/2020, dan 2020/2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk madrasah, peserta didik pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah terus mengalami kenaikan, dimana pada tahun ajaran 2020/2021 jumlah peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah mencapai 1.344 siswa. Peningkatan yang serupa juga terjadi pada jenjang Madrasah Aliyah, yang mencatatkan jumlah siswa sebanyak 1.889 siswa di tahun ajaran 2020/2021. Namun hal ini tidak terjadi pada jenjang Madrasah Tsanawiyah, dimana jumlah peserta didiknya mengalami penurunan, dengan jumlah siswa sebanyak 3.568 orang di tahun ajaran 2020/2021.

Tabel 3.2.
Jumlah Murid menurut Jenjang Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021

Jenjang Pendidikan	Tahun Ajaran		
	2018/2019	2019/2020	2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Madrasah Ibtidaiyah	1,185	1,257	1,344
Madrasah Tsanawiyah	5,136	4,247	3,568
Madrasah Aliyah	1,733	1,814	1,889

Sumber: Kementerian Agama Kepulauan Meranti

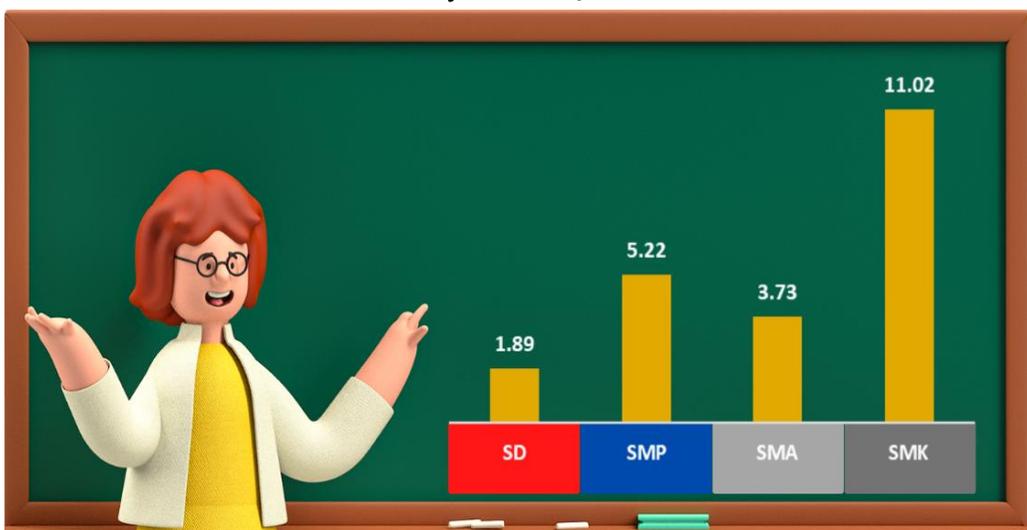


Tenaga Pendidik

Di bidang pendidikan, banyak variabel yang berpengaruh terhadap tercapainya mutu pendidikan, diantaranya adalah tenaga pendidik atau guru. Dalam upaya pembangunan pendidikan dan upaya mencapai tujuan pendidikan nasional, ketersediaan guru baik secara kualitas dan kuantitas memegang peranan penting. Ketersediaan guru yang cukup akan memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas, baik secara tatap muka maupun daring. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan guru adalah perbandingan antara jumlah guru dan murid, yaitu keberadaan guru dan berapa jumlah siswa yang harus dilayani. Perbandingan ideal antara guru dan murid menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menggunakan komposisi satu (1) guru melayani dua puluh (20) orang siswa.

Jumlah guru sekolah di Kepulauan Meranti pada tahun ajaran 2020/2021 di setiap jenjang pendidikan seluruhnya mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar pada jumlah guru di jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Penambahan jumlah guru ini menjadi nilai tambah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kepulauan Meranti. Masih banyak faktor lain yang juga harus diupayakan dalam mencapai tingginya kualitas pendidikan, antara lain ketersediaan fasilitas belajar dan mengajar yang memadai, rasio murid dan guru, serta implementasi metode pengajaran secara tepat.

Gambar 3.5.
Persentase Perubahan Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan Sekolah,
Tahun Ajaran 2020/2021

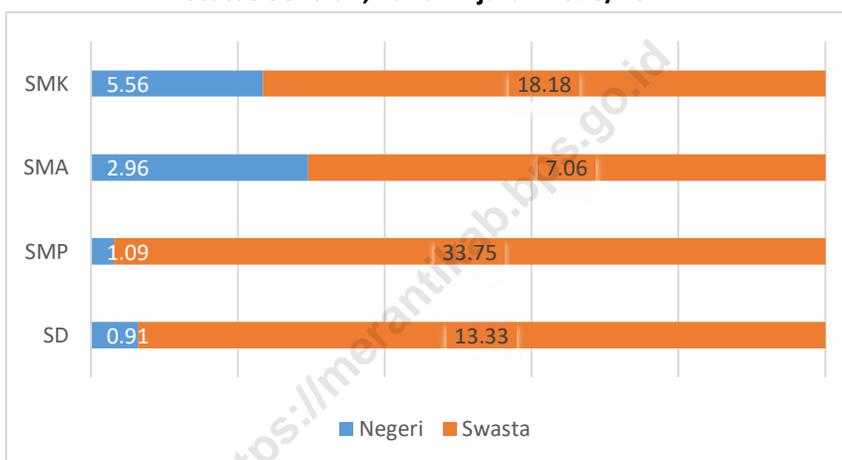


Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Meningkatnya jumlah guru di Kepulauan Meranti didominasi penambahan guru di sekolah swasta. Di tahun ajaran 2020/2021, persentase penambahan guru di sekolah swasta terkecil di jenjang Sekolah Menengah Atas sebesar 7,06 persen, dan terbesar di jenjang Sekolah Menengah Pertama sebesar 33,75 persen. Sedangkan untuk sekolah negeri, penambahan terbesar sebanyak 5,56 persen di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan dan terkecil di jenjang Sekolah Dasar sebesar 0,91 persen.

Gambar 3.6.
Persentase Perubahan Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan Sekolah dan Status Sekolah, Tahun Ajaran 2020/2021



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Salah satu indikator untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar, dan juga untuk melihat mutu pengajaran di kelas adalah rasio murid dan guru. Rasio ini dihitung dengan melakukan perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah. Idealnya satu guru bertanggung jawab terhadap 20 murid. Pada **Tabel 3.7** dapat dilihat bahwa perbandingan jumlah murid dan jumlah guru yang ada di Kepulauan Meranti untuk tahun ajaran 2020/2021 berada di bawah angka 1:20. Artinya rasio guru-murid untuk setiap jenjang pendidikan berada di atas rasio ideal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini dapat dikatakan baik karena dengan jumlah peserta didik yang lebih sedikit, guru dapat memberikan fokus dan perhatian yang lebih selama proses pembelajaran.



Tabel 3.3
Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021

Jenjang Pendidikan	Rasio Murid per Guru		
	TA 2018/2019	TA 2019/2020	TA 2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar	12.27	11.20	10.84
Sekolah Menengah Pertama	10.65	9.72	9.39
Sekolah Menengah Atas	12.06	11.52	10.51
Sekolah Menengah Kejuruan	13.82	17.66	9.46

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Madrasah sebagai satuan pendidikan formal yang setara dengan sekolah umum, juga diupayakan agar memiliki tenaga pendidik yang cukup. Guru Madrasah di Kabupaten Kepulauan Meranti umumnya mengalami peningkatan pada tahun ajaran 2020/2021, seperti terlihat pada **Tabel 3.7**. Hanya guru di jenjang madrasah ibtidaiyah yang mengalami sedikit penurunan jumlah.

Gambar 3.7.
Jumlah Guru menurut Jenjang Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2019/2020, dan 2020/2021



Perbandingan jumlah murid dan jumlah guru Madrasah di Kepulauan Meranti untuk tahun ajaran 2020/2021 berada di bawah angka 1:10. Artinya rasio guru-murid untuk setiap jenjang pendidikan jauh berada di atas rasio ideal yang ditetapkan oleh Pemerintah, lebih baik dari rasio murid guru sekolah. Guru madrasah dapat memberikan fokus dan perhatian yang lebih selama proses pembelajaran karena jumlah peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya lebih sedikit.

Tabel 3.4.
Rasio Murid per Guru menurut Jenjang Pendidikan Madrasah di Kabupaten Kepulauan Meranti, Tahun Ajaran 2018/2019, 2019/2020, dan 2020/2021

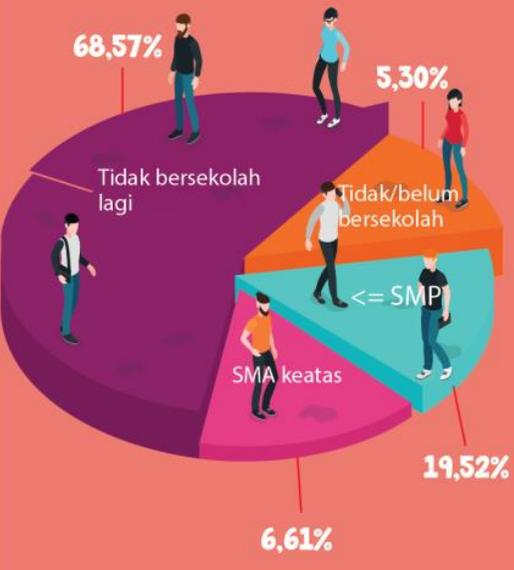
Jenjang Pendidikan	Rasio Murid per Guru		
	TA 2018/2019	TA 2019/2020	TA 2020/2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Madrasah Ibtidaiyah	7	7	8
Madrasah Tsanawiyah	8	7	5
Madrasah Aliyah	6	6	5

Sumber: Kementerian Agama Kepulauan Meranti



PARTISIPASI SEKOLAH

KARAKTERISTIK PENDUDUK LAKI-LAKI



Persentase penduduk laki-laki yang tidak/belum bersekolah sebanyak 5,30 persen

Persentase penduduk laki-laki yang bersekolah sampai jenjang SMP sebanyak 19,52 persen



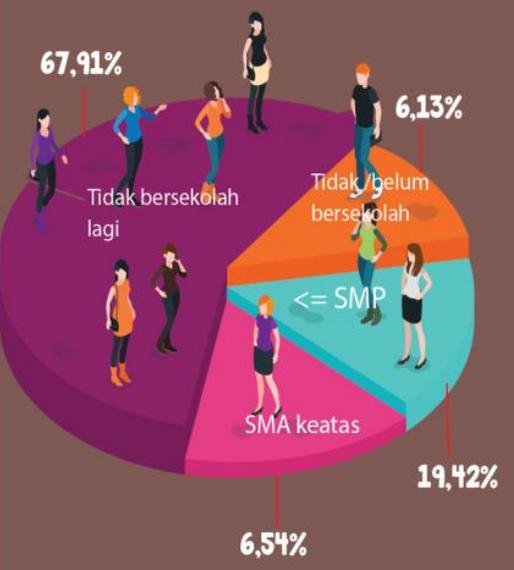
ANGKA PARTISIPASI KASAR

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
SD	107.46	106.55
SMP	107.91	102.38
SMA	72.34	86.4



APK laki-laki pada jenjang pendidikan SD/ sederajat melebihi 100 persen yang menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar range 7-12 tahun.

KARAKTERISTIK PENDUDUK PEREMPUAN



Persentase penduduk perempuan yang bersekolah sampai jenjang SMA keatas sebanyak 6,54 persen

Persentase penduduk perempuan yang tidak bersekolah lagi sebanyak 67,91 persen



<https://merantikab.bps.go.id>

BAB IV

PARTISIPASI SEKOLAH

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara sesuai dengan yang tertera pada UUD 1945 Pasal 28c dan 31. Pemenuhan hak tersebut tercermin dari sejauh mana pencapaian partisipasi sekolah yang merupakan hak setiap kalangan, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, termasuk juga penyandang disabilitas. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan keempat SDGs menjamin kualitas pendidikan inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.

COVID-19 telah menghantam stabilitas berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek pendidikan. Pengalihan metode pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi metode daring menyulitkan sejumlah kalangan. Efektivitas yang diragukan dari pembelajaran daring membuat sebagian orang menyerah dan akhirnya melepas bangku sekolah. Jika dalam kondisi normal saja *gap* kesempatan bersekolah antarkelompok besar, tentunya kondisi pandemi ini akan semakin mempersulit kelompok *vulnerable* dalam mengakses pendidikan.

Indikator partisipasi sekolah selain digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah diberikan pemerintah, juga untuk melihat apakah target yang ditetapkan pemerintah tercapai. Partisipasi sekolah menggambarkan efektivitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat, yang artinya semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektifnya suatu program. Hasil Susenas 2019-2021 memperlihatkan hasil penghitungan berbagai indikator partisipasi sekolah mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi.

Partisipasi Sekolah

Salah satu modal utama dalam pembangunan adalah manusia. Selain menjadi output dari pembangunan, kualitas sumber daya manusia itu juga merupakan faktor penentu pembangunan ekonomi. Peningkatan investasi pada modal manusia membawa hasil peningkatan akses teknologi, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pendekatan yang umumnya digunakan untuk mengukur modal manusia dalam pembangunan adalah dengan menggunakan pendekatan faktor-faktor pembentuk modal manusia seperti pendidikan dan kesehatan. Idealnya, manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang semakin baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.



Salah satu bentuk peningkatan modal manusia dalam pendidikan di Kepulauan Meranti dapat dilihat dari persentase partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah diukur melalui tiga indikator, yakni Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Masing-masing indikator memiliki esensi berbeda. APS menitikberatkan pada partisipasi anak usia sekolah, sedangkan APK dan APM memberikan fokus cakupan partisipasi sekolah dari sudut pandang jenjang pendidikan.

Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak/belum pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi. Di Kepulauan Meranti, masih ada sebanyak 5,71 persen penduduk berusia 5 tahun ke atas yang belum pernah bersekolah. Penduduk yang masih bersekolah di tahun 2021 sebesar 26,04 persen, dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi, baik yang putus sekolah maupun yang sudah lulus dari sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya kembali, sebesar 68,25 persen. Secara umum 94,29 persen penduduk di Kepulauan Meranti sudah pernah mengikuti pendidikan formal, baik yang masih aktif, maupun yang sudah tidak menjalani pendidikan.

Tabel 4.1.
Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021

Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	5,30	6,13	5,71
Masih Bersekolah SD/Sederajat	12,60	13,74	13,16
Masih Bersekolah SMP/Sederajat	6,92	5,68	6,31
Masih Bersekolah SMA/Sederajat dan ke Atas	6,61	6,54	6,57
Tidak Bersekolah Lagi	68,57	67,91	68,25

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Pendidikan dasar formal dimulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan tinggi. Jenjang umur penduduk usia sekolah berada pada rentang 7 tahun hingga 24 tahun. Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa di tahun 2021 persentase penduduk usia 7-24 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah sebesar 0,19 persen, yang masih bersekolah sebesar 74,35 persen, dan yang tidak bersekolah lagi sebesar 25,47



persen. Berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang tidak/belum pernah bersekolah lebih besar dari penduduk laki-laki. Namun persentase penduduk perempuan yang masih bersekolah lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki.

Keberhasilan pendidikan tentunya akan menciptakan sumber daya manusia unggul, berkualitas, dan berdaya saing tinggi, yang akan menjadi pendorong positif untuk keberhasilan pembangunan. Di sinilah peran penting penduduk usia sekolah 7-24 tahun. Mereka adalah bagian dari komposisi penduduk pada rentang usia sekolah, dimana hendaknya mereka yang berada pada rentang usia tersebut masih aktif dalam mengenyam pendidikan di bangku sekolah tanpa terkecuali.

Tabel 4.2.
Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021

Partisipasi Sekolah	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	0,06	0,32	0,19
Masih Bersekolah SD/Sederajat	35,18	38,93	37,00
Masih Bersekolah SMP/Sederajat	19,11	16,49	17,84
Masih Bersekolah SMA/Sederajat dan ke Atas	19,62	19,38	19,51
Tidak Bersekolah Lagi	26,02	24,87	25,47

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menggambarkan seberapa besar kesempatan individu memperoleh pendidikan. APS dibedakan menurut kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan. Indikator ini tidak mempertimbangkan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh individu.

Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk usia tertentu. Publikasi ini menggunakan



dua kelompok umur perguruan tinggi yaitu 19-24 tahun dan 19-23 tahun. Kelompok umur 19-23 tahun mengacu pada metadata indikator SDGs, sedangkan kelompok umur 19-24 tahun tetap dipertahankan untuk menjaga keterbandingan data dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa APS terbesar di Kepulauan Meranti pada tahun 2021 berada pada kelompok umur 7-12 tahun dengan nilai sebesar 99,14 persen. Dapat dikatakan bahwa hampir semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Nilai APS menurun pada setiap kelompok umur selanjutnya, dengan nilai sebesar 97,19 persen untuk kelompok umur 13-15 tahun dan sebesar 88,85 persen pada kelompok umur 16-18 tahun. Semakin mendekati usia dewasa, peluang kegiatan ekonomi semakin terbuka untuk individu. Kondisi ini menimbulkan *trade-off* antara menghabiskan waktu untuk sekolah atau menghasilkan pendapatan (bekerja). Mereka yang kurang beruntung secara ekonomi cenderung sulit bertahan di sekolah.

Tabel 4.3.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 - 12 Tahun	99,10	99,17	99,14
13 - 15 Tahun	94,86	100,00	97,19
16 - 18 Tahun	85,08	93,30	88,85

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) bertujuan untuk melihat tingkat partisipasi sekolah berdasarkan jenjang pendidikan. Indikator ini menunjukkan seberapa besar kapasitas sistem pendidikan di suatu negara untuk menampung peserta didik dari kelompok usia tertentu (UNESCO, 2009). Pemerintah menjadikan APK sebagai salah satu indikator pendidikan yang senantiasa dimonitor pergerakannya guna mencapai target RPJMN. Dalam naskah RPJMN 2020-2024, hanya APK jenjang perguruan tinggi yang disebutkan sebagai indikator dari agenda pembangunan “terpenuhinya pelayanan dasar”.



Nilai APK dapat melebihi 100 persen karena adanya peserta didik di atas dan di bawah umur sebagai indikasi terlalu dini/terlambat mendaftar sekolah dan pengulangan kelas. Proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut juga tergambar oleh APK. Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya siswa yang sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

APK terbesar di Kepulauan Meranti pada tahun 2021 berada pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dengan nilai sebesar 100,99 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APK semakin rendah. APK pada jenjang Sekolah Menengah Pertama memiliki nilai sebesar 105,40 persen dan APK untuk jenjang Sekolah Menengah Atas memiliki nilai yang paling kecil, sebesar 78,80 persen. APK pada jenjang pendidikan SD/ sederajat melebihi angka 100 persen yang menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan dasar masih ada yang berada di luar range 7-12 tahun. Dengan kata lain, murid SD yang masih bersekolah lebih banyak dibandingkan jumlah anak pada usia SD (7-12 tahun). Berbagai hal bisa menjadi alasan, antara lain orang tua yang terkadang mendaftarkan anak yang belum mencapai usia 7 tahun ke sekolah dasar, angka mengulang kelas yang tinggi, dan lain sebagainya.

Tabel 4.4.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar	107,46	106,55	106,99
Sekolah Menengah Pertama	107,91	102,38	105,40
Sekolah Menengah Atas	72,34	86,40	78,80

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021



APK berdasarkan jenis kelamin pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar menunjukkan laki-laki memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal yang sama juga terjadi pada APK pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sebaliknya, pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas nilai APK perempuan lebih tinggi dari laki-laki.

Angka Partisipasi Murni

Indikator lain yang dihasilkan dalam publikasi ini adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian.

Angka Partisipasi Murni (APM) bertujuan untuk mengukur sejauh mana cakupan jenjang pendidikan tertentu bagi individu kelompok usia sekolah yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tersebut. APM mengindikasikan partisipasi sekolah yang tepat waktu, yaitu jenjang SD/Sederajat (7-12 tahun), SMP/Sederajat (13-15 tahun), dan SM/Sederajat (16-18 tahun). Untuk jenjang pendidikan tinggi, indikator APM kurang tepat digunakan karena besarnya variasi durasi program pendidikan (UNESCO, 2009).

Pola yang sama pada APS dan APK juga dialami oleh APM, dimana semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APM semakin rendah. APM pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar memiliki nilai paling tinggi, yaitu sebesar 98,73 persen. Angka ini menunjukkan sebanyak 98,73 persen penduduk usia sekolah setara SD yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

Tabel 4.5.

Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekolah Dasar	98,27	99,17	98,73
Sekolah Menengah Pertama	83,13	94,66	88,36
Sekolah Menengah Atas	61,22	81,19	70,39

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021



Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan, telah menjadi sasaran dalam rencana pembangunan pemerintah. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga mendukung upaya memenuhi hak-hak perempuan, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta memperkuat pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Berdasarkan jenis kelamin, nilai APM penduduk perempuan selalu lebih tinggi di setiap jenjang pendidikan dibandingkan penduduk laki-laki. Dapat dikatakan bahwa penduduk perempuan di Kepulauan Meranti pada umumnya sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya.

<https://merantikab.bps.go.id>



<https://merantikab.bps.go.id>



CAPAIAN PENDIDIKAN

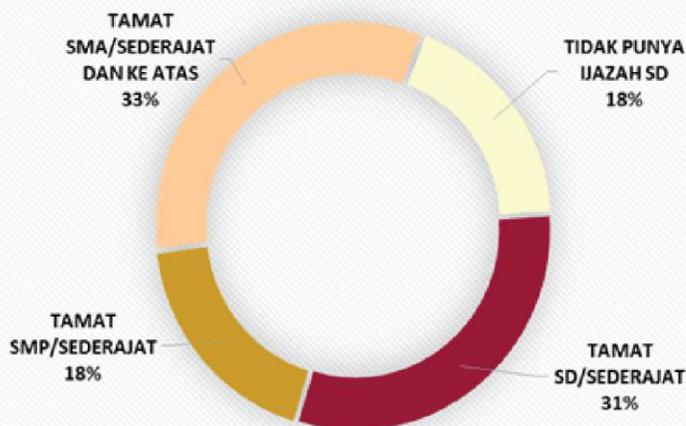


Angka Melek Huruf di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kelompok Umur Tahun 2021

Karakteristik	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15 +
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100.00	99.92	98.05
Jenis Kelamin			
Laki-laki	100.00	99.94	98.72
Perempuan	100.00	99.90	97.36

AMH 15 tahun ke atas penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dari 100 penduduk perempuan berusia 15 tahun keatas, 97-98 orang bisa membaca huruf latin

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, Tahun 2021



Sebanyak 18 persen penduduk Usia 15 tahun keatas tidak punya ijazah SD, artinya dari 100 orang penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berusia 15 tahun keatas sebanyak 18 orang tidak punya ijazah SD

BAB V

HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berperan sebagai katalisator pembangunan. Tujuan pembangunan pendidikan dalam menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua diharapkan dapat tercapai.

Bab ini mengulas beberapa capaian pembangunan pendidikan melalui indikator pendidikan yang bersumber dari Susenas 2019-2021. Capaian pendidikan dapat ditinjau dari Angka Melek Huruf (AMH) penduduk kelompok umur muda dan dewasa, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas, dan rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas.

Angka Melek Huruf (AMH)

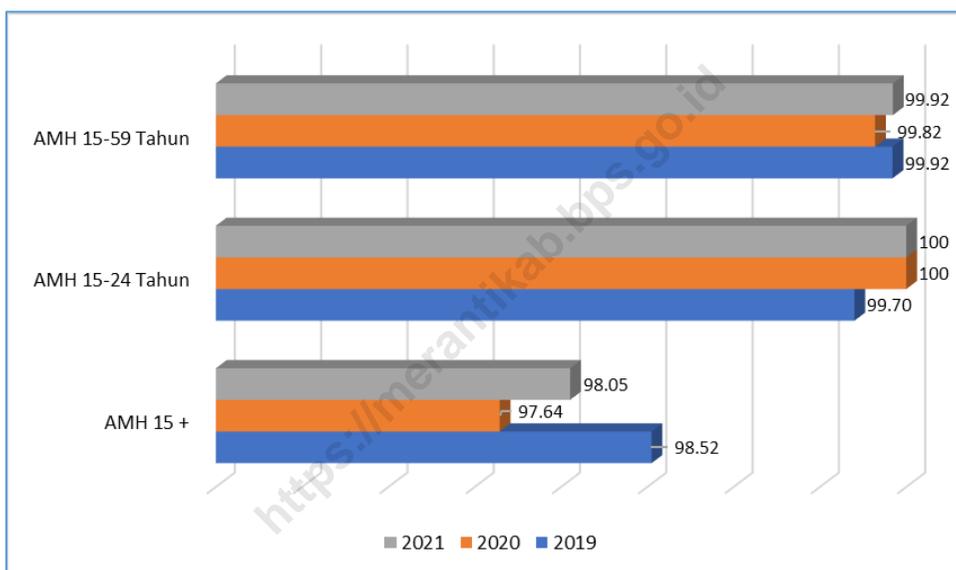
Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi. Dengan kemampuan tersebut seseorang dapat menambah pengetahuan dan keterampilannya dan berujung pada peningkatan kualitas hidup diri, keluarga bahkan negaranya di berbagai bidang kehidupan. Indikator yang digunakan untuk melihat kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis adalah Angka Melek Huruf (AMH). Sejak 10 tahun terakhir, AMH digunakan sebagai ukuran efektifnya sistem pendidikan dasar. Ukuran AMH digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. Selain itu, AMH merupakan salah satu indikator yang menjadi target SDGs pada pilar Sosial, yaitu target 4.6. Implikasi dari ditetapkannya AMH sebagai indikator SDGs adalah pada tahun 2030 ditargetkan semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Pada Gambar 5.1 dapat dilihat dari tahun 2019-2021 capaian AMH baik usia 15 tahun keatas, 15-24 tahun maupun 15-59 tahun selalu mengalami peningkatan. Namun, peningkatannya dapat dikatakan lambat bahkan cenderung stagnan karena angkanya yang sudah mencapai hampir 100 persen. Apabila dibandingkan capaian AMH untuk setiap kelompok umur, AMH usia 15 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan AMH usia 15-24 tahun dan AMH usia 15-59 tahun. Pada



tahun 2021, AMH usia 15-24 tahun di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 100 persen, AMH usia 15-59 tahun mencapai 99,92 persen sedangkan AMH usia 15 tahun keatas sebesar 98,05 persen. Hal ini disebabkan karena pada kelompok umur 15 tahun ke atas juga mencakup penduduk lanjut usia yang kemampuan keaksaraannya kurang atau banyak yang sudah lupa. Selain itu, program keaksaraan fungsional juga hanya dikhususkan bagi penduduk usia 15-59 tahun.

Gambar 5.1.
Angka Melek Huruf di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kelompok Umur, 2019-2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2019-2021

Merujuk pada Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa dari jenis kelamin, capaian AMH 15 tahun ke atas penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki (97,36 persen dibanding 98,72 persen). Hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam memacu peningkatan AMH kelompok umur 15 tahun ke atas yakni pada penduduk perempuan. Hal ini dikarenakan kelompok penduduk tersebut memiliki AMH yang sedikit lebih rendah sehingga perlu menjadi fokus pemerintah. Literasi merupakan hak asasi manusia dan memiliki pengaruh pada penerimaan informasi seseorang. Semakin rendah kemampuan literasi seseorang, semakin kecil peluang mengakses pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan dalam kehidupannya. Perempuan pada khususnya, peningkatan kemampuan literasi dapat mengurangi kerentanan pada pemiskinan, kekerasan, dan dimarginalkan atau tidak diperhitungkan dalam proses-proses pengambilan keputusan.



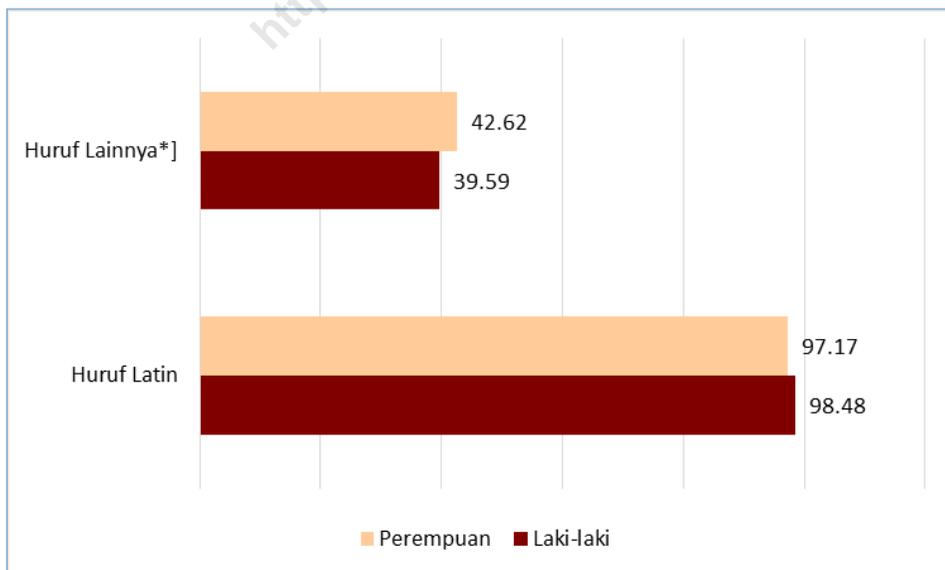
Tabel 5.1.
Angka Melek Huruf di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kelompok Umur, 2021

Karakteristik	Kelompok Umur		
	15-24 Tahun	15-59 Tahun	15 +
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	100.00	99.92	98.05
Jenis Kelamin			
Laki-laki	100.00	99.94	98.72
Perempuan	100.00	99.90	97.36

Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Hasil yang sama ditunjukkan dalam Gambar 5.2 di bawah ini, kemampuan penguasaan penduduk perempuan terhadap huruf lainnya lebih rendah dibandingkan dengan penduduk laki-laki (97,17 persen dibanding 94,48 persen). Namun, berbanding terbalik untuk huruf lainnya, dari 100 penduduk perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat sekitar 42 orang yang memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis menggunakan huruf lainnya. Sedangkan untuk penduduk laki-laki sekitar 39 orang.

Gambar 5.2.
Kemampuan Membaca dan Menulis Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Jenis Kelamin, 2021



Catatan: *) Huruf lainnya yaitu selain huruf latin

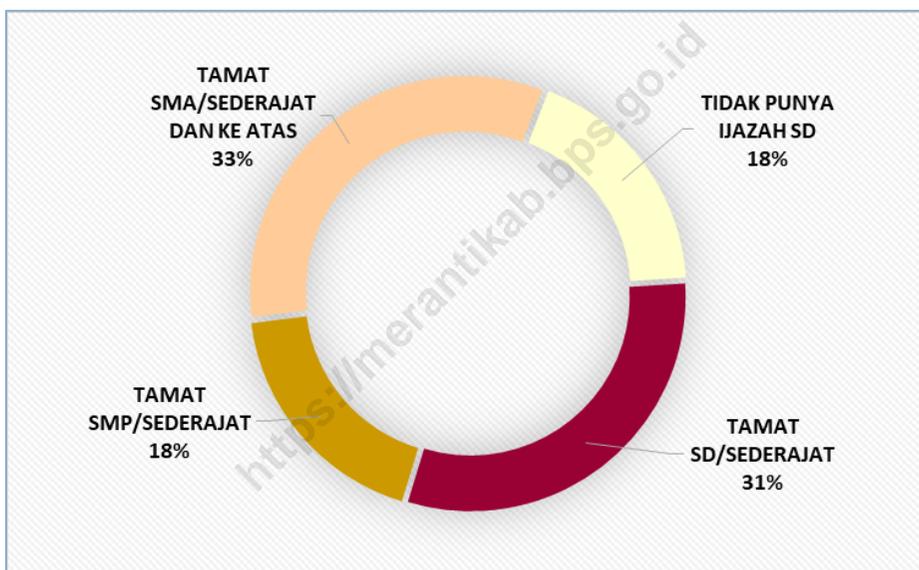
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021



Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti usia 15 tahun ke atas didominasi oleh pendidikan menengah ke atas. Dari 100 penduduk berusia 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 18 orang yang tidak menamatkan SD/Sederajat, sekitar 31 orang yang menamatkan SD/Sederajat, sekitar 18 orang yang menamatkan SMP/Sederajat, dan sekitar 33 orang yang menamatkan SMA/Sederajat dan ke atas termasuk menamatkan Perguruan Tinggi (PT).

Gambar 5.3.
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2021

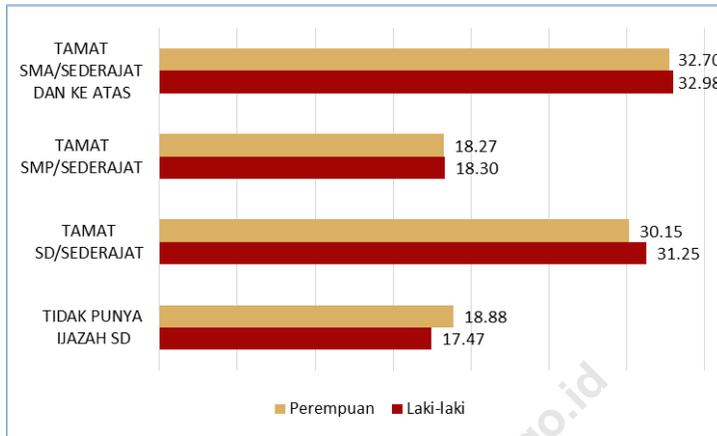


Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting dalam pembangunan di suatu negara. Maka laki-laki maupun perempuan haruslah mendapatkan pendidikan yang layak dan tidak ada pembedaan. Pada Gambar 5.4 dapat dilihat informasi pendidikan yang ditamatkan berdasarkan jenis kelamin. Untuk setiap tingkatan pendidikan, proporsi penduduk laki-laki dan penduduk perempuan hampir berimbang. Dapat dikatakan, tidak terdapat kesenjangan pendidikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penduduk laki-laki dan perempuan di Kepulauan Meranti secara umum memiliki kesempatan yang sama dalam menamatkan pendidikan yang sedang dijalannya, sehingga semakin memudahkan mereka dalam berperan untuk membantu mewujudkan pembangunan.



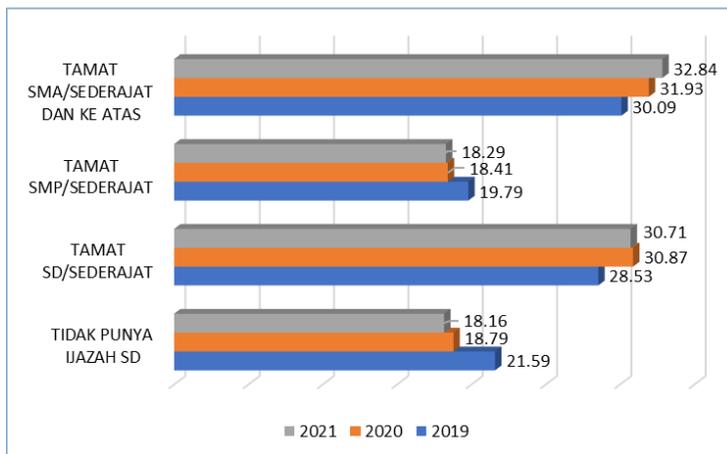
Gambar 5.4.
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2021



Sumber: BPS, Susenas Maret 2021

Jika dilihat dari pertumbuhan tingkat pendidikan tahun 2019-2021 seperti ditampilkan dalam Gambar 5.5 dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti usia 15 tahun ke atas yang tidak menamatkan SD untuk periode tahun tersebut mengalami penurunan, dari 21,59 persen di tahun 2019 menjadi 18,16 persen. Secara umum, jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan untuk setiap tingkatan meningkat. Penurunan terjadi hanya untuk tingkatan Tamat SMP/Sederajat. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran penduduk untuk memperoleh pendidikan di atas SMP/Sederajat.

Gambar 5.5.
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin, 2019-2021



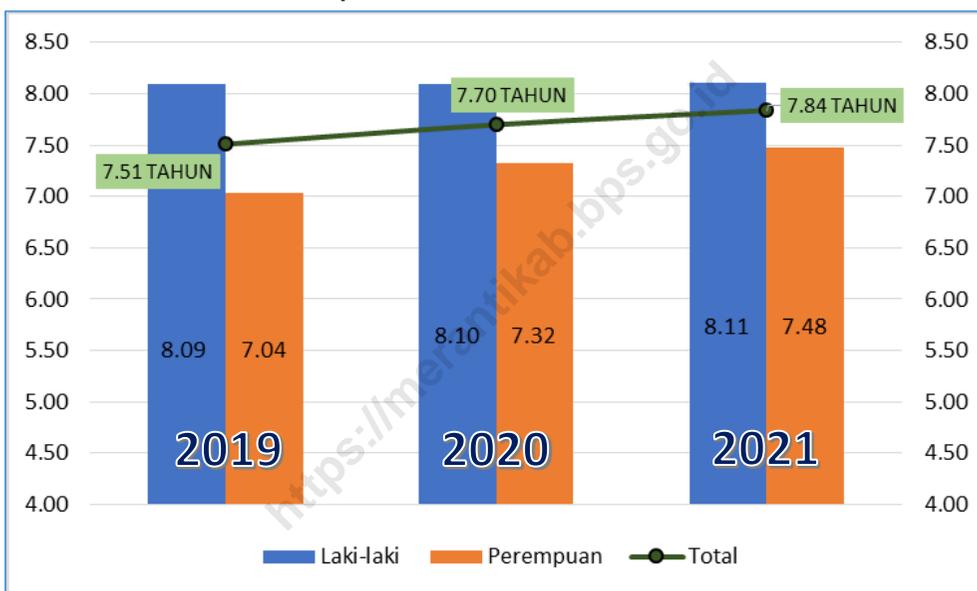
Sumber: BPS, Susenas Maret 2021



Sebagaimana tujuan pembangunan pendidikan, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, merata, dan meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, maka pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Salah satunya pemerintah juga harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik dan ekonomi.

Rata-rata Lama Sekolah

Gambar 5.6
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2019-2021



Jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang dapat dilihat berdasarkan rata-rata lama sekolah. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan. Sampai sejauh mana kemampuan penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah juga dapat dilihat melalui indikator ini.

Berdasarkan Gambar 5.6 rata-rata lama sekolah dari tahun 2019-2021 terus mengalami peningkatan. Peningkatan setiap tahunnya berkisar antara 0,14 sampai 0,15 tahun. Sementara capaian RLS di tahun 2021 sebesar 7,84 tahun atau setara kelas 1 SMP/Sederajat. Peningkatan dan capaian ini menunjukkan bahwa perkembangan RLS termasuk mengalami percepatan. Selain itu, pembangunan manusia berbasis gender di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan perbaikan dalam periode waktu yang sama.



Tabel 5.2.
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021

Karakteristik	Rata-rata Lama Sekolah
(1)	(2)
Total	7.84
Jenis Kelamin	
Laki-laki	8.11
Perempuan	7.48

Pada Tabel 5.2 terlihat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021 sudah lebih dari 7 tahun. Dengan kata lain, rata-rata penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Kepulauan Meranti, sudah menyelesaikan jenjang pendidikan SD/ sederajat. Tabel tersebut juga menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas berdasarkan jenis kelamin. Rata-rata lama sekolah laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki 8,11 tahun dan penduduk perempuan 7,48 tahun. Dengan kata lain, dapat dikatakan rata-rata penduduk laki-laki maupun perempuan sudah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SD/ sederajat.



SAMPLING ERROR



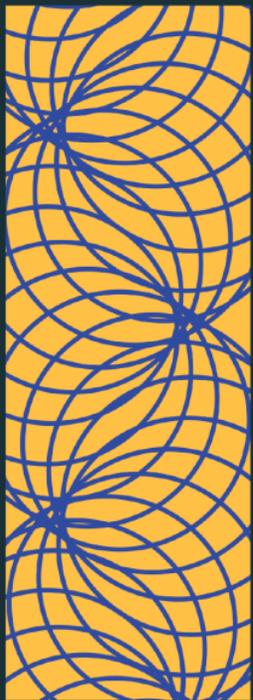
Sampling error adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik sampling dalam suatu survei



CATATAN

DAFTAR PUSTAKA

TEKNIK



Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik

RSE \leq 25% dianggap akurat

RSE $>$ 25% tetapi \leq 50% perlu hati-hati jika ingin digunakan

RSE $>$ 50% maka nilai estimasi tersebut dianggap sangat tidak akurat



HASIL PENGHITUNGAN *SAMPLING ERROR*

Estimasi dari sampel survei dipengaruhi oleh dua jenis *error* (kesalahan) yaitu *sampling error* dan *non-sampling error* (seperti kesalahan dalam wawancara dan kesalahan pengolahan). *Sampling error* adalah kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik *sampling* dalam suatu survei. Besarnya *sampling error* secara teori statistik ditunjukkan oleh besarnya angka *standard error* dari suatu angka estimasi persentase suatu variabel yang disajikan dari hasil Susenas 2019-2021. Untuk mengukur presisi dari suatu angka estimasi digunakan besarnya *relative standard error*, yaitu rasio dari nilai *standard error* dengan nilai estimasi suatu variabel, yang dinyatakan dalam persentase (%).

Standard error juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confidence interval*), yaitu interval nilai yang dapat menggambarkan populasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan (*interval estimation*) dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan nilai indikator yang semakin baik.

RSE \leq 25% dianggap **akurat**

RSE $>$ 25% tetapi \leq 50% perlu **hati-hati** jika ingin digunakan

RSE $>$ 50% maka nilai estimasi tersebut dianggap **sangat tidak akurat**

Salah satu cara mengatasinya yaitu dengan menggabungkan estimasi tersebut dengan estimasi lain untuk mendapatkan nilai estimasi yang RSE-nya lebih kecil.



Tabel 1. RSE Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021

Partisipasi Sekolah	2021		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(8)	(9)	(10)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	14,68	14,01	14,34
Masih Bersekolah SD/Sederajat	9,95	9,34	9,64
Masih Bersekolah SMP/Sederajat	14,26	14,79	14,52
Masih Bersekolah SMA/Sederajat dan ke Atas	14,54	14,12	14,33
Tidak Bersekolah Lagi	2,52	2,53	5,52



Tabel 2. RSE Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun ke Atas menurut Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2019-2021

Partisipasi Sekolah	2021		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	NA	NA	NA
Masih Bersekolah SD/Sederajat	8,88	8,11	8,50
Masih Bersekolah SMP/Sederajat	13,61	14,28	13,95
Masih Bersekolah SMA/Sederajat dan ke Atas	13,45	13,33	13,39
Tidak Bersekolah Lagi	10,49	11,48	10,99



Tabel 3. RSE Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2019-2021

Kelompok Umur	2021		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 - 12 Tahun	0,75	0,83	0,56
13 - 15 Tahun	94,86	3,74	0,00
16 - 18 Tahun	85,08	6,02	3,58



Tabel 4. RSE Angka Partisipasi Murni (APM)) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021

Jenjang Pendidikan	2021		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	1,13	0,83	0,70
SMP	7,31	3,23	4,16
SMA	11,37	6,85	6,67

<https://merantikab.bps.go.id>



Tabel 5. RSE Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2021

Tingkat Pendidikan	2021		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	8,40	8,37	8,78
Masih Bersekolah SD/Sederajat	6,00	6,19	6,09
Masih Bersekolah SMP/Sederajat	8,63	8,44	8,58
Masih Bersekolah SMA/Sederajat dan ke Atas	5,86	5,99	5,92
Tidak Bersekolah Lagi	NA	NA	NA



Tabel 6. RSE Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2020

Tingkat Pendidikan	2020		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	10,15	10,41	10,28
Masih Bersekolah SD/Sederajat	6,43	6,76	8,5
Masih Bersekolah SMP/Sederajat	7,26	8,86	13,95
Masih Bersekolah SMA/Sederajat dan ke Atas	8,48	8,32	13,39
Tidak Bersekolah Lagi	NA	NA	NA



Tabel 7. RSE Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas, 2019

Tingkat Pendidikan	2019		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum Pernah Bersekolah	11,56	10,41	10,99
Masih Bersekolah SD/Sederajat	6,85	7,45	8,5
Masih Bersekolah SMP/Sederajat	8,75	7,16	13,95
Masih Bersekolah SMA/Sederajat dan ke Atas	8,8	8,39	13,39
Tidak Bersekolah Lagi	NA	NA	NA



CATATAN TEKNIS

Susenas

merupakan survei rumah tangga dengan cakupan variabel yang sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi penduduk. Pengumpulan data Susenas dibagi menjadi Kor (dilaksanakan setiap tahun) dan Modul (3 tahun sekali) yang meliputi Modul Ketahanan Sosial, Modul Kesehatan dan Perumahan, serta Modul Sosial Budaya dan Pendidikan yang pelaksanaannya dilakukan secara bergantian. Pelaksanaan Susenas mulai tahun 2015 dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Tahun 2020, Jumlah total sampel Susenas Maret 2020 se Indonesia sebanyak 345.000 rumah tangga, sedangkan di Provinsi Riau sebanyak 8.390 rumah tangga.

Tipe Daerah Tempat Tinggal

menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas perkotaan.

Rumah Tangga Biasa

adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Kepala Rumah Tangga (KRT)

adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART)

adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.



Tidak Termasuk Anggota Rumah Tangga

yakni orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Rasio Murid-Guru

adalah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru.

Rasio Murid-Kelas

adalah perbandingan jumlah murid dalam suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang tersedia.

Pendidikan Formal

adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/SDLB/MI/ sederajat, SMP/SMPLB/MTs/ sederajat, SM/SMLB/MA/ sederajat dan PT.

Pendidikan Nonformal

adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B, dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Tamat Sekolah

adalah jika responden telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Tidak Punya Ijazah SD



adalah kepala ruta/anggota ruta yang tidak memiliki ijazah suatu jenjang pendidikan atau pernah bersekolah di Sekolah Dasar atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, Paket A1- A100, Paket A Setara SD) tetapi tidak/belum tamat. Termasuk juga kepala ruta/anggota ruta yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat.

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB). Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, dan Sekolah Penata Rontgen.

Tidak/Belum Pernah Sekolah

adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih Bersekolah

adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak Bersekolah Lagi

adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM)



adalah proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap penduduk pada kelompok usia tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Melek Huruf (AMH)

adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya terhadap seluruh penduduk.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

<https://meranti.go.id>



DAFTAR PUSTAKA

- Andini dkk. 2022. Analisis Efek Pandemi Covid-19 Terhadap Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM)*, 2(1), 196-204. Diakses [28/12/2022] dari <https://ummaspul.e-journal.id/JKM/article/download/2866/828>
- Ali. 2021. "Lima Sekolah Dasar di Selatpanjang akan Dimerger" dalam *pekanbaruexpress.com* (30 November 2021). <https://pekanbaruexpress.com/berita/810-lima-sekolah-dasar-di-selatpanjang-akan-dimerger.html>. Diakses pada 28 Desember 2022
- Bappenas, 2020. METADATA INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti 2021*. Selatpanjang: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti 2020*. Selatpanjang: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti, 2019. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Meranti 2019*. Selatpanjang: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Cooper, dan Alvarado, A. 2006. Preparation, Recruitment, and Retention of Teachers. UNESCO International Academy of Education, (Online). <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000152023>. Diakses 28 Desember 2022.
- Kemendikbud. (2020). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020, 15 Juni. Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Covid-19. Diakses pada 28 Desember 2022, dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/06/panduanpenyelenggar>



[aan-pembelajaran-pada-tahun-ajaran-dan-tahun-akademikbaru-di-masa-covid19.](#)

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Statistik Persekolahan SD 2020/2021. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Statistik Persekolahan SMP 2020/2021. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Statistik Persekolahan SMA 2020/2021. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Statistik Persekolahan SMK 2020/2021. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. 8 Juli 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301. Jakarta.
- UNESCO. (2009). Survival rate by grade. Diakses pada 28 Desember 2022 dari <http://uis.unesco.org/en/glossary-term/survival-rate-grade>.
- UNESCO. (2009). Education Indicators Technical guidelines. Diakses [28/12/2022] dari http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-indicatorstechnical-guidelines-en_0.pdf



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**
Jl. Dorak, Desa Banglas, Kec. Tebing Tinggi
Telp: (0763) 33553, e-mail: bps1410@bps.go.id
Homepage: <https://merantikab.bps.go.id>